

Pengembangan Kapasitas BUMDES di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo

(Capacity Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bongo III Village, Wonosari Subdistrict, Boalemo Regency)

Joice Machmud^{1*}, Harijono Imbran², Umar Sako Baderan³

Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo, Indonesia^{1,2,3}

joicemachmud74@gmail.com^{1*}, harijonoimbran@umgo.ac.id², usbaderan@umgo.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 10 Juli 2025

Revisi 1 pada 17 Juli 2025

Revisi 2 pada 24 Juli 2025

Revisi 3 pada 29 Juli 2025

Disetujui pada 12 Agustus 2025

Abstract

Purpose: This community service program aims to strengthen the management capacity of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bongo III Village, Wonosari District, Boalemo Regency. The goal is to enhance the community's knowledge, skills, and awareness to manage BUMDes professionally, participatively, and sustainably, based on local potential.

Methodology/approach: The activity was conducted on April 26–27, 2025, in Bongo III Village, using a participatory experiential workshop method. The program applied adult learning principles and the experiential learning cycle (concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, and active experimentation) through interactive discussions, group simulations, and business plan development sessions. Data were collected through field observations and in-depth interviews with village stakeholders. No specific software was used for the analysis.

Results/findings: The training increased participants' understanding of BUMDes institutional concepts, improved their managerial skills, and fostered community awareness regarding the importance of transparent and accountable governance. The participants successfully developed a preliminary business revitalization plan based on local agricultural and fisheries commodities.

Conclusion: The training strengthened the community's capacity to manage BUMDes professionally and encouraged active local economic participation.

Limitations: The activity was limited in duration (two days) and did not include long-term mentoring or monitoring of BUMDes implementation.

Contribution: This study contributes to community development, rural economic empowerment, and public administration by providing a contextual model for institutional capacity building at the village level. This is relevant to academics, practitioners, and policymakers involved in rural governance and economic development.

Keywords: BUMDES, Capacity Development, Management.

How to Cite: Machmud, Joice., Imbran, Harijono., Baderan, Umar Sako. (2025). Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 4(2), 77-84.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya dirancang untuk memperkuat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan partisipatif dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Salah satu orientasi penting dalam kebijakan ini adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui pemberian ruang otonomi yang lebih luas kepada daerah, termasuk desa, untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan potensi dan kebutuhan khas masing-masing wilayah. Secara normatif, Pasal 1 Ayat 5 undang-undang ini menegaskan bahwa "otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Dalam kerangka ini, desa tidak hanya diposisikan sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki otonomi asli untuk mengatur dan mengelola sumber daya lokal secara mandiri.

Sebagai kelanjutan dari semangat desentralisasi tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes hadir sebagai instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian lokal dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Melalui BUMDes, pemerintah desa didorong untuk mengelola aset dan penyediaan layanan secara profesional dan mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pratama, 2022). Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbasis pada pemisahan kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga sebagai sarana pelayanan sosial ekonomi bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pengembangan ekonomi lokal berbasis BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, potensi sumber daya lokal, serta kemampuan desa dalam mengelola penyertaan modal dan dukungan kelembagaan (Yuliani & Sari, 2021).

Dari perspektif teoretis, pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (community-based development) sangat relevan diterapkan dalam penguatan BUMDes. Model pembangunan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Studi-studi terbaru mengonfirmasi bahwa pembangunan berbasis masyarakat sangat efektif dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat desa, terutama ketika masyarakat diberikan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya (Setiawan & Aulia, 2021). BUMDes juga memiliki peran ganda yang unik: sebagai lembaga sosial yang mendukung pelayanan publik dan sebagai lembaga komersial yang bertujuan meningkatkan pendapatan desa. Kedua fungsi ini membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan, dan partisipatif untuk menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Hakim & Rahayu, 2023). Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial BUMDes, termasuk pelatihan manajemen, penguatan regulasi lokal, dan dukungan teknologi informasi, menjadi sangat krusial dalam menjamin keberlanjutan kelembagaan ini sebagai penggerak ekonomi desa.

Desa Bongo III, yang terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam dan sosial yang cukup signifikan. Potensi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi kekuatan utama desa ini dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal melalui lembaga ekonomi desa, khususnya BUMDes, yang secara hukum telah dibentuk tetapi belum mampu berfungsi secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan aparat desa, teridentifikasi sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat operasionalisasi BUMDes di Desa Bongo III. Pertama, terdapat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek manajemen usaha dan akuntansi keuangan. Kedua, belum tersedia program pelatihan rutin yang dapat meningkatkan keterampilan teknis dan administratif pengelola BUMDes. Ketiga, BUMDes belum memiliki dokumen rencana usaha jangka menengah dan panjang yang dapat menjadi panduan strategis dalam pengelolaan bisnis. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi masih sangat terbatas, baik dalam pencatatan keuangan, pemasaran, maupun pelaporan kinerja.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat dan terbatasnya akses terhadap lembaga pendamping profesional yang dapat memberikan bantuan teknis dan manajerial. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Boalemo tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 82 desa yang memiliki BUMDes, hanya sekitar 25% yang berstatus aktif dan produktif. Dengan demikian, Desa Bongo III termasuk dalam kategori desa dengan BUMDes tidak aktif atau pasif, yang mencerminkan belum optimalnya fungsi lembaga ekonomi desa sebagai penggerak pembangunan lokal

Berbagai studi menyatakan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengelola, sistem tata kelola yang baik, serta dukungan kelembagaan yang konsisten dari pemerintah dan mitra pembangunan (Rahman & Fauziah, 2022). Selain itu, pentingnya penyusunan rencana usaha yang berbasis potensi lokal serta keterlibatan aktif masyarakat merupakan elemen kunci dalam membangun BUMDes yang inklusif dan kompetitif (Maulana et al., 2021). Oleh karena itu, intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam bentuk program penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan manajemen usaha, asistensi teknis, dan integrasi sistem informasi desa yang mendukung pengelolaan usaha secara transparan dan akuntabel. Program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi lembaga ekonomi desa. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan lainnya dibutuhkan dalam merancang dan melaksanakan intervensi yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan (Wulandari, 2023). Dengan pendekatan ini, diharapkan BUMDes di Desa Bongo III dapat berkembang menjadi badan usaha yang tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Metodologi penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada penguatan kapasitas manajerial Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bongo III dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif berbasis pengalaman. Metode workshop dipilih karena telah terbukti mampu mendorong keterlibatan aktif peserta, membangun kolaborasi, serta memperkuat transfer pengetahuan dan keterampilan secara kontekstual. Menurut pendapat (Lestari & Wijaya, 2021), pendekatan partisipatif dalam pelatihan masyarakat desa sangat efektif dalam membangun rasa kepemilikan dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, proses pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip andragogi yang sesuai dengan karakteristik peserta dewasa, yaitu melalui dialog, pemecahan masalah, serta pengalaman langsung yang bermakna.

Pelaksanaan workshop merujuk pada pendekatan *experiential learning* kontemporer sebagaimana dijelaskan oleh (Zainuddin & Idris, 2022), yang menekankan pada empat tahapan utama: pengalaman konkret, refleksi aktif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif. Pendekatan ini penting agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam konteks pengelolaan BUMDes. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Penyampaian Materi

Pada tahap awal, peserta diberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan regulasi BUMDes, tata kelola kelembagaan, serta peran strategis BUMDes dalam pembangunan ekonomi lokal. Materi disampaikan melalui ceramah interaktif yang dilengkapi studi kasus dan multimedia guna memudahkan pemahaman.

Tahap 2: Diskusi Terfokus (Focused Group Discussion)

Setelah penyampaian materi, dilakukan sesi diskusi kelompok untuk mendalami topik yang telah dipaparkan. Diskusi ini memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman lokal, serta mendiskusikan hambatan di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial modern, yang memandang interaksi sosial sebagai medium utama dalam pembentukan pengetahuan baru (Hidayat & Pratama, 2023).

Tahap 3: Melakukan simulasi organisasi BUMDes

Peserta dilibatkan dalam simulasi organisasi BUMDes, seperti latihan musyawarah desa, penyusunan struktur organisasi, hingga diskusi pemetaan potensi dan pemilihan unit usaha yang relevan. Proses ini bertujuan melatih keterampilan manajerial dasar dan membangun kemampuan pengambilan keputusan berbasis musyawarah.

Tahap 4: Penyusunan Rencana Usaha

Peserta dibimbing dalam menyusun rencana usaha yang mencakup pemilihan jenis usaha, analisis kelayakan, strategi mitigasi risiko, serta pemasaran berbasis potensi lokal. Tahap ini menggunakan pendekatan pengembangan kapasitas kontemporer yang menekankan peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan secara sistematis dan berkelanjutan (UNDP, 2021).

Tahap 5: Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi reflektif, di mana peserta bersama fasilitator menganalisis proses pelatihan, mengidentifikasi capaian dan tantangan, serta menyusun rencana tindak lanjut yang realistis. Evaluasi dilakukan secara partisipatif untuk memastikan bahwa hasil pelatihan berdampak nyata dalam memperkuat kelembagaan BUMDes di desa.

Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, kegiatan pengabdian tidak hanya memperkuat kapasitas teknis pengelola BUMDes, tetapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan sosial, meningkatkan literasi kelembagaan, dan mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembangunan ekonomi desa kini menghadapi tantangan dan peluang yang semakin kompleks. Di tengah transformasi sosial dan ekonomi nasional, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga sebagai entitas kelembagaan yang menjembatani antara potensi lokal dan mekanisme pasar. Dalam konteks ini, pelatihan penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, menjadi momentum penting untuk mendorong revitalisasi ekonomi lokal berbasis kelembagaan desa yang kuat.

Kegiatan pelatihan ini dirancang sebagai bentuk konkret dari upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran kolektif dalam mengelola BUMDes secara profesional dan berkelanjutan. Dengan melibatkan 29 peserta dari berbagai unsur, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan pelaku usaha lokal, kegiatan ini menjadi ruang dialog partisipatif sekaligus sarana pembelajaran transformatif. Tingginya antusiasme peserta tercermin dari keterlibatan aktif dalam berbagai sesi pelatihan, mulai dari diskusi kelompok, simulasi kelembagaan, hingga penyusunan rencana aksi strategis.

3.1 Materi Pelatihan dan Proses Pembelajaran

Materi pelatihan disusun secara sistematis dan kontekstual, mencakup empat aspek utama: (1) pemahaman dasar tentang konsep, regulasi, dan peran strategis BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa; (2) tahapan pendirian dan legalitas kelembagaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (3) manajemen organisasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel; serta (4) strategi pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melalui metode simulasi dan praktik langsung agar peserta tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi mampu menginternalisasi keterampilan manajerial secara aplikatif. Salah satu aktivitas unggulan dalam pelatihan ini adalah simulasi penyusunan struktur organisasi BUMDes, termasuk pembuatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pemetaan unit usaha potensial, serta praktik manajemen operasional sederhana berbasis produk lokal seperti hasil pertanian dan perikanan. Pelatihan ini secara nyata memberikan pengalaman belajar yang kontekstual, sehingga peserta lebih mudah memahami prinsip-prinsip dasar kelembagaan ekonomi desa.

3.2 Dampak Pelatihan terhadap Transformasi Kesadaran Kolektif

Hasil dari pelatihan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap pentingnya pengelolaan BUMDes yang tidak semata administratif, tetapi juga harus mampu menghasilkan dampak ekonomi konkret bagi masyarakat. Dalam sesi evaluasi, peserta menyampaikan kesadaran baru mengenai pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan usaha desa. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Rahayu et al., 2022) yang menekankan pentingnya kapasitas SDM dan transparansi pelaporan keuangan sebagai indikator keberhasilan BUMDes. Sebagai langkah tindak lanjut, sebagian peserta telah menyusun rencana revitalisasi BUMDes Desa Bongo III, termasuk peninjauan ulang terhadap unit-unit usaha potensial, seperti pengolahan hasil pertanian dan distribusi sembako. Inisiatif ini mencerminkan semangat baru dalam membangun BUMDes sebagai pilar ekonomi desa yang inklusif dan mandiri, sebagaimana dikemukakan oleh (Ibrahim et al., 2025) bahwa proses penguatan BUMDes akan efektif jika diawali dengan transformasi kapasitas dan semangat inovatif dari pengelola dan masyarakat.

3.3 Dimensi Kelembagaan dan Kerangka Regulatif

Secara konseptual, BUMDes adalah instrumen kelembagaan ekonomi yang didesain untuk mendorong kemandirian desa melalui pengelolaan potensi lokal secara partisipatif. Landasan hukum yang kuat tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa BUMDes bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Afero et al., 2022). Pelatihan ini mengintegrasikan pemahaman teoretis dan regulatif melalui studi literatur dan praktik lapangan. Menurut (Rahmawati & Supriyadi, 2021), keberhasilan BUMDes ditentukan oleh tiga pilar: kualitas SDM pengelola, tingkat partisipasi masyarakat, dan kelenturan regulasi terhadap konteks lokal. Oleh karena itu, pelatihan ini memberi perhatian khusus pada pentingnya transparansi kelembagaan, sistem pelaporan keuangan yang akuntabel, dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai fondasi pengelolaan yang profesional.

3.4 Profesionalisme dan Tata Kelola Organisasi

Aspek penting lain yang dibahas dalam pelatihan adalah mekanisme rekrutmen pengelola BUMDes. Peserta menyadari bahwa pengelolaan kelembagaan ekonomi desa tidak boleh didasarkan pada kedekatan personal atau pertimbangan politik, melainkan harus mengedepankan kompetensi, integritas, dan komitmen sosial. Temuan ini diperkuat oleh studi (Dewi & Permana, 2022) yang menyatakan bahwa rekrutmen berbasis merit dan pelatihan berkelanjutan adalah prasyarat tata kelola usaha desa yang adaptif dan akuntabel. Sebagai bentuk nyata profesionalisme, peserta juga dikenalkan dengan prinsip-prinsip akuntansi dasar, sistem pengawasan internal, serta manajemen risiko usaha. Dengan pendekatan praktis dan berbasis studi kasus, pelatihan ini berhasil membekali peserta dengan perangkat teknis yang dapat digunakan dalam operasional BUMDes ke depan.

3.5 Musyawarah Desa sebagai Pilar Kelembagaan

Pembangunan kelembagaan BUMDes tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat desa. Dalam hal ini, Musyawarah Desa (Musdes) menjadi mekanisme deliberatif yang memegang peranan penting dalam proses pendirian, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kinerja BUMDes. Pelatihan ini menekankan pentingnya Musdes yang inklusif dan terbuka terhadap partisipasi semua elemen masyarakat. Hal ini senada dengan pandangan (Baderan & Napu, 2020) yang menekankan bahwa kualitas deliberasi dalam Musdes sangat menentukan keberhasilan BUMDes, terutama dalam membangun legitimasi kelembagaan dan rasa kepemilikan bersama. Dalam diskusi kelompok, peserta mengakui bahwa selama ini Musdes cenderung bersifat formalitas. Namun, melalui pelatihan ini, mereka memahami pentingnya membangun ruang dialog yang sehat, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi warga.

3.6 Pemetaan Potensi Lokal dan Strategi Usaha

Salah satu kekuatan utama pelatihan ini adalah penekanan pada strategi pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Peserta bersama fasilitator melakukan pemetaan sumber daya desa seperti hasil pertanian (pisang, jagung, kelapa), perikanan air tawar, serta UMKM lokal. Proses ini mengacu pada prinsip asset-based development, yaitu pembangunan yang bertumpu pada kekuatan dan keunggulan lokal

(Machmud et al., 2018). Dalam diskusi lanjutan, peserta menyepakati beberapa unit usaha yang layak dikembangkan oleh BUMDes, seperti pengolahan keripik pisang, penggilingan jagung, serta pemasaran hasil pertanian secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya menghasilkan output dalam bentuk peningkatan kapasitas, tetapi juga mendorong peserta untuk mulai menyusun roadmap usaha BUMDes secara realistis dan berbasis data.

3.7 Diversifikasi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha

Pelatihan ini juga membuka wawasan baru mengenai fleksibilitas kelembagaan BUMDes. Peserta dikenalkan pada skema BUMDes berbadan hukum, seperti BUMDesa Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021. Skema ini memungkinkan BUMDes menjalin kemitraan bisnis secara legal dan akuntabel, memperluas jejaring usaha lintas sektor dan antarwilayah (Falimu et al., 2023). Pemahaman tentang kemitraan usaha menjadi perhatian peserta, karena membuka peluang baru bagi BUMDes untuk membangun relasi dengan pelaku ekonomi luar desa, koperasi, dan lembaga keuangan. Di sinilah BUMDes berperan sebagai entitas yang menjembatani ekonomi mikro desa dengan sistem ekonomi yang lebih luas.

3.8 Partisipasi Modal dan Kemandirian Finansial

Kemandirian BUMDes tidak hanya bergantung pada dukungan dana desa, tetapi juga partisipasi modal dari masyarakat. Dalam pelatihan ini, peserta dikenalkan pada skema penyertaan modal warga dalam bentuk saham sukarela atau tabungan masyarakat. Skema ini bertujuan membangun rasa memiliki sekaligus memperkuat modal sosial dan finansial kelembagaan BUMDes (Dharma et al., 2023). Dengan kepemilikan bersama, BUMDes tidak lagi dipandang sebagai proyek pemerintah semata, melainkan sebagai milik kolektif yang harus dijaga, diawasi, dan dikembangkan oleh seluruh masyarakat. Menurut (Sembiring & Metalia, 2023), skema partisipatif seperti ini meningkatkan akuntabilitas internal dan memperkuat legitimasi sosial lembaga.

3.9 Refleksi dan Rekomendasi Keberlanjutan

Secara umum, pelatihan ini menjadi tonggak awal bagi transformasi kelembagaan ekonomi desa yang lebih mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Dari refleksi peserta, terdapat beberapa rekomendasi penting: (1) perlunya pelatihan lanjutan untuk pendalaman materi keuangan dan digitalisasi usaha; (2) pembentukan tim fasilitator lokal sebagai pendamping BUMDes; dan (3) penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, akademisi, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem usaha desa. Sinergi antara regulasi, teori akademik, dan praktik lokal yang dibangun melalui pelatihan ini menunjukkan bahwa transformasi BUMDes dari narasi normatif menjadi kenyataan fungsional sangat mungkin dilakukan. Sebagaimana ditegaskan oleh (Kurniawan et al., 2024), intervensi berbasis pelatihan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat desa dalam menghadapi tantangan ekonomi lokal maupun global.

4. Kesimpulan

Pelatihan manajemen BUMDes di Desa Bongo III ini telah memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kapasitas masyarakat untuk membangun dan mengelola usaha desa secara profesional dan berkelanjutan. Respon peserta terhadap materi pelatihan sangat baik, menunjukkan adanya antusiasme dan semangat yang tinggi dari masyarakat untuk mengembangkan BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa. Kegiatan ini berhasil mengintegrasikan aspek regulasi, teori akademik, dan praktik lapangan secara komprehensif, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai kelembagaan, manajemen, dan strategi pengembangan BUMDes. Dengan bekal pelatihan ini, diharapkan desa mampu mendirikan atau merevitalisasi BUMDes yang sesuai dengan potensi lokal serta melibatkan seluruh elemen masyarakat secara partisipatif.

Sebagai bagian dari penutup, ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Gorontalo, para pimpinan dan aparat Desa Bongo III, pengelola BUMDes Desa Bongo III, serta mahasiswa Kuliah Kerja Dakwah (KKD) Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang telah berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya kegiatan ini, baik dalam bentuk fasilitasi maupun partisipasi langsung di lapangan.

Referensi

- Afero, D., Rosalia, F., & Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan . *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(2 SE-Articles), 151–159. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1136>
- Baderan, U. S., & Napu, B. (2020). Peran bumdes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa ayuhula kecamatan dungaliyo kabupaten gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 3(2), 66–72. [10.31314/jsap.3.2.66-72.2020](https://doi.org/10.31314/jsap.3.2.66-72.2020)
- Dewi, I. P., & Permana, A. (2022). Optimalisasi tata kelola BUMDes melalui penguatan kapasitas pengelola. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58–45–58.
- Dharma, F., Agustina, Y., & Roslina, R. (2023). Pengembangan Usaha Bumdes Jejama Usaha melalui Tiktok, Literasi Keuangan, dan Program Kerja . *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 4(1 SE-Articles), 47–54. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2356>
- Falimu, F., Aimang, H. A., & Lamadang, K. P. (2023). Peningkatan Bumdes Berdasarkan Aspek Metodologi Melalui PKM . *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 4(1 SE-Articles), 137–143. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2505>
- Hakim, A. R., & Rahayu, S. (2023). BUMDes dan transformasi ekonomi desa: Strategi tata kelola yang berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 15(1), 55–67–55–67.
- Hidayat, R., & Pratama, Y. (2023). Social constructivism in rural development training: A participatory approach to local empowerment. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Desa*, 8(1), 55–67–55–67.
- Ibrahim, A. I., Zahara, Z., Adam, R. P., Islianty, N. R., & Nugraha, M. E. (2025). Penguatan Kelembagaan Bumdes melalui Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Potensi Desa Masaingi. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 5(4 SE-Articles), 857–865. <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i4.3545>
- Kurniawan, A. W., Latifah, H., Fanaqi, C., & Margani, A. (2024). Peningkatan Kapasitas Komunikasi Kader dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting di Kecamatan Bayongbong . *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 4(3 SE-Articles), 409–416. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i3.2699>
- Lestari, N., & Wijaya, A. (2021). Participatory learning as a strategy for empowering village-owned enterprises (BUMDes): A case study in Central Java. *Jurnal Pemberdayaan Desa*, 6(2), 120–133–120–133.
- Machmud, J., Baderan, u. S., & Azis, I. (2018). Pengelolaan Bumdes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.31314/jppe.v1i2.840>
- Maulana, H., Syamsul, H., & Hartati, I. (2021). Pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 112–126–112–126.
- Novalia, N., Kurniawan, M., Sudiyanto, T., Mursalin, M., Suhada, S., & Puspita, S. (2024). Penguatan UMKM Simpang Sender melalui Pelatihan Manajerial bagi Para Pelaku Usaha. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 243–253. <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i2.3093>
- Pratama, Y. (2022). Penguatan kelembagaan BUMDes sebagai strategi pemberdayaan ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 114–128–114–128.
- Rahayu, R., Roza, H., Edmawati, S. D., & Karib, A. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Keuangan: Studi Pada BUMNag di Sumatera Barat . *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 1(1 SE-Articles), 7–13. <https://doi.org/10.35912/jpe.v1i1.737>
- Rahman, F., & Fauziah, A. (2022). Tata kelola BUMDes: Tantangan dan strategi keberlanjutan kelembagaan ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan Daerah*, 9(1), 75–88–75–88.
- Rahmawati, E., & Supriyadi, D. (2021). Partisipasi dan kapasitas SDM dalam pengelolaan BUMDes: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 100–115–100–115.
- Saragih, S., Nur, N., Junita, I., Kristine, F., Mariana, A., Widiastuti, R., & Lu, C. (2024). Penguatan Daya Saing UMKM melalui Pelatihan Manajemen Kualitas. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 337–346. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i3.2661>

- Sembiring, S. I. O., & Metalia, M. (2023). Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengembangan Ekowisata melalui Business Plan dan Penguatan Mental Usaha di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 225–233. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i4.1471>
- Setiawan, H., & Aulia, N. (2021). Community-based development: A sustainable approach in rural economic empowerment. *Journal of Rural and Community Development*, 16(1), 45–60–45–60.
- UNDP. (2021). Capacity development: A UNDP primer for sustainable development. In *United Nations Development Programme*. <https://www.undp.org/publications/capacity-development>
- Wahyuni, S., & Andriyani, Y. (2021). Akuntabilitas dan transparansi sebagai determinan keberhasilan BUMDes: Studi pada desa wisata. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 234–245–234–245
- Wulandari, D. (2023). Peran perguruan tinggi dalam pendampingan BUMDes: Strategi pemberdayaan berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 35–48–35–48.
- Yuliani, E., & Sari, M. D. (2021). Model pengelolaan BUMDes berbasis partisipasi masyarakat dan potensi lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 225–239–225–239.
- Zainuddin, M., & Idris, S. (2022). Experiential learning in community-based training: A model for rural entrepreneurship development. *Journal of Rural Development and Innovation*, 4(1), 15–29–15–29.